

JURNAL

**PERAN POLISI DALAM MENCEGAH ANAK DI BAWAH UMUR
MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :
MATTIAS MAURIZ TARIGAN**

NPM	: 06 05 09515
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERAN POLISI DALAM MENCEGAH ANAK DI BAWAH UMUR
MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Diajukan oleh :
MATTIAS MAURIZ TARIGAN**

N P M : 06 05 09515
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Gus Nurhartanto, SH, L.L.M.

**Peran Polisi Dalam Mencegah Anak Di Bawah Umur Mengendarai
Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Mattias Mauriz Tarigan, Paulinus Soge, Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Abstract

Role of the police in preventing minors driving a motor vehicle on a public road Yogyakarta special region. purpose of this study was to determine the role of the police in preventing minors driving a motor vehicle on public roads and to know what are the obstacles constraints faced by the police in preventing minors driving a motor vehicle on public roads in Yogyakarta special region . This research method using the method of literature study books , laws and through direct interviews with the parties directly involved in preventing minors driving a motor vehicle . the results of the study , the police prefer the pre - emptive action , or in other words the prevention , socialization and guidance to the minors to learn and understand the rules on the road , but the police also take action to enforce repressive laws and remind children No underage law enforcement officers on the street . constraints faced by the police while the police are often regarded as an enemy or a dangerous ghost street and should be avoided rather than regarded as a savior on the road .

key words : minors , motor vehicles , police , traffic .

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang bersifat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia¹.

Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi perilaku di masyarakat sebagai pengguna produk teknologi baru.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang transportasi adalah produksi kendaraan bermotor. Produksi kendaraan bermotor pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil. Kenyataannya meningkatnya produksi kendaraan bermotor mempunyai dampak lain yang sifatnya negatif yakni semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri di berbagai wilayah.

Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan

¹ <http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/05/Skipi-Tindakan-Hukum-Kepolisian-Lalu-Lintas-Terhadap-Pelanggaran-Lalu-Lintas-Yang-Dilakukan-Oleh-Pengendara-Roda-Dua-di-Bawah-Umur-di-Wilayah-Hukum-Polresta-Kendari>, 12 September 2013

dan antar pedesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi, sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global. Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas². Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi

² *Ibid.* hlm. 1.

kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Pada masa sekarang ini banyak orang tua memberikan anaknya kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan walaupun sebenarnya anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Kebiasaan ini karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat membawa mobil atau sepeda motor padahal masih SD atau SMP. Karena itu orang tua harus ikut bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah peran polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalanan umum, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota pelajar sehingga banyak anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor di jalanan umum Yogyakarta. Sebagian besar dari anak-anak tersebut belum memiliki KTP apalagi surat izin untuk mengemudi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya polisi dalam mencegah anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta ?

2. Apa kendala yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Polisi

1. Pengertian Polisi

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2

³ Momo Kelana, Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*, PTIK, Jakarta 1972 hlm 22

Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

2. Tugas Polisi

Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 menentukan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2002

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 menentukan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum.

3. Tugas dan Fungsi Polisi di Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya, maka polisi lalu lintas pun harus bertindak.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Pengertian anak di bawah umur menurut KUHP terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur enam belas tahun dalam pasal 283 ayat (1) yang berhubungan dengan tulisan-tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, serta anak dibawah umur lima belas tahun dalam pasal 287 ayat (1), yang berkaitan dengan

prsetubuhan. Maka jelaslah bahwa pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan aturan umum, sedangkan pasal-pasal lain di atas merupakan pengecualian dari aturan umum tersebut.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”

C. Upaya Polisi Dalam Mencegah Anak di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tersebut, fakta menunjukkan bahwa banyak anak yang sebenarnya belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor. Padahal Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah mengatur masalah pengemudi kendaraan bermotor.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur syarat untuk mendapatkan Surat

Izin Mengemudi. Disana ditentukan syarat-syaratnya adalah setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.

Pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan dengan jelas bahwa :

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat Izin Mengemudi D
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B

II

Polisi harus selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat. Didalam lalu lintas fungsi utama polisi harus dijalankan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya. Setiap Polisi harus tahu tiga fungsi utama mereka, yaitu :

1. Fungsi pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
2. Fungsi preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi perlindungan dan pertolongan,

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

3. Fungsi represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

D. Kendala Polisi Dalam Mencegah Anak di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Kendala yang dihadapi polisi dalam upaya mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar.

Kendala lain yang dihadapi polisi berdasarkan hasil wawancara dengan KASUDIB DIKYASA DITLANTAS POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak AKBP M. Affandi. Kendala terbesar yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya tentang undang-undang yang diberlakukan sehingga terjadi pelanggaran dan polisi menindak pelaku pelanggaran sering dianggap mencari

keuntungan pribadi, bukan sebagai penegak hukum. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku di jalanan sering disalah pahami oleh masyarakat. Ini menimbulkan sinisme di tengah-tengah masyarakat terhadap peran dan tugas polisi. Peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan resisten. Protes dan nada menolak sering diserukan masyarakat. Fenomena ini membuat polisi dianggap sebagai hantu jalanan yang harus ditakuti dan dihindari bukan sebagai juru selamat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib di jalan. Ini menjadi kendala terberat bagi polisi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu :

1. Upaya polisi lalu lintas dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama yang diatur pada pasal 12 mengenai tugas dan fungsi polisi lalu lintas menjalankan fungsi polisi melalui 2 tindakan yaitu :
 - a. tindakan pre-emptif, yaitu dengan segala macam tindakan pencegahan. Contohnya dengan program polisi sahabat anak sejak dini, *police goes to school*,

pembentukan pasukan keamanan sekolah di bawah binaan polisi, *police goes to campus*, program satu sekolah dua polantas.

- b. tindakan represif, yaitu Tindakan ini dilakukan untuk penegakan hukum lalu lintas apabila terjadi pelanggaran di jalan.

2. Kendala yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang dianggap musuh oleh anak-anak di bawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*, PTIK, Jakarta 1972

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

WEBSITE

<http://irwansyah-hukum.blogspot.com>